BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu dari 100 dan 46 negara berkembang yang telah meratifikasi Konvensi Basel 1989 tentang Pengiriman Limbah Berbahaya dan Beracun, yang dikenal sebagai Limbah B-3, namun Indonesia terus menjadi sasaran pembuangan limbah B-3 secara ilegal. Percuma Menurut Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), lebih dari 5.000 ton sampah plastik yang masuk ke Indonesia dari Amerika Serikat, Jepang, dan Australia telah disita sejak larangan impor diberlakukan. Dengan desentralisasi pengelolaan, impor sampah ke Indonesia menjadi lebih transparan setiap tahunnya.

Karena desentralisasi, sebagian besar urusan administrasi sehari-hari dialihkan dari administrasi negara ke kotamadya. Hal ini mendorong banyak eksportir mencari daerah-daerah terutama daerah terpencil untuk menerima limbah B-3, dengan iming-iming kompensasi yang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Eksportir dari negara maju membuang limbah B-3 dengan harga yang menarik bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, nilai ini lebih murah daripada pemrosesan internal di dalam negeri, karena standar lingkungan yang tinggi harus diperhatikan. Kuatnya kegiatan ekspor-impor limbah yang mengandung B-3 ke negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ketidaktahuan pengambil keputusan tentang limbah B-3. Kedua,

kurangnya sarana dan prasarana untuk mengidentifikasi dan menganalisis limbah B-3. Ketiga, Ketiga besarnya biaya pengolahan limbah tersebut dan ketatnya, keempat, banyaknya tipu muslihat para eskportir¹

Hukum Internasional saat ini sedang melakukan sebuah transisi dengan keadaan negara yang sedang tidsk baik bahkan telah terjadi penurunan dibidang kesehahatan. Persoalan kemudian hadir ditengah-tengah negara maju dan bberkembang adlah menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat adanya pandemi yang cukup panjang.

Penegakan hukum adalah suatu proses usaha untuk meneguhkan atau secara aktual menuntun norma-norma hukum dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari segi subjek, penuntutan dapat dilakukan oleh berbagai subjek dan dapat pula diartikan sebagai upaya untuk mematuhi hukum dan melibatkan segala persoalan hukum dalam setiap hubungan hukum. Mematuhi aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku berarti Anda mematuhi atau mematuhi aturan hukum. Dalam arti sempit, penuntutan pidana dipahami hanya sebagai upaya otoritas polisi tertentu untuk menjamin atau memastikan kepatuhan terhadap aparaturn penegak hukum daya paksa².

Terlalu banyak sampah yang dihasilkan dan kurangnya pengelolaan sampah yang cerdas dapat menyebabkan bencana bagi

¹ 3 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Internasional, Diktat Fakultas Hukum Universitas Andalas, hal.40.

² Mansyur Effendi. 2005. *“Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)”*. Bogor : Ghalia Indonesia.hlm. 21

manusia dan lingkungan. Setiap hari produksi sampah meningkat dan kualitas sampah juga bervariasi, dan segala resiko mengintai, yang tentunya mempengaruhi baku mutu air, udara dan tanah, dan yang dampaknya pada akhirnya kembali kepada manusia. Meningkatnya produksi sampah tidak berjalan seiring dengan strategi penanganan dan pengelolaan sampah yang optimal, sehingga permasalahan sampah hanya baunya tidak sedap³. Perkembangan zaman telah meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat. Pemerintah memperluas berbagai layanan kesehatan yang ditawarkan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hal yang sedang dibenahi oleh pemerintah dan salah satunya adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit. Berbagai teknik canggih untuk mengobati berbagai penyakit. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan berbagai kegiatan kesehatan dan dapat berfungsi sebagai sarana pelatihan dan penelitian bagi masyarakat.

Beberapa regulasi dan undang-undang terkait pengelolaan sampah di Indonesia antara lain UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dalam Pasal 163 tentang Kesehatan Lingkungan, yang mencakup upaya kesehatan lingkungan yang bertujuan untuk mencapai kualitas lingkungan yang sehat pada tingkat fisik, kimia, biologi, dan sosial, sehingga memungkinkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi semua. UU Perlindungan dan Peduli Lingkungan No. 32 Tahun 2009 menetapkan

³ Pengelolaan sampah, https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah, dikunjungi 12 Januari 2022

standar lingkungan nasional. Peraturan saat ini bertujuan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sering disebabkan oleh limbah. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan Perlindungan Lingkungan berbunyi sebagai berikut:

1) Setiap orang yang membawa, membuat, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, membuang, mengolah dan/atau menyimpan B3 ke dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib mengelola B3. 2) Ketentuan tambahan tentang pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan pemerintah.

Terkait masalah limbah, Pada tahun 1999, WHO melaporkan terdapat delapan kasus pekerja medis yang tertular HIV melalui luka di Prancis, dua di antaranya terjadi pada petugas yang menangani limbah medis. Di Indonesia, sebuah laporan menyebutkan bahwa 10 juta perawatan injeksi dilakukan setiap bulan. Selain untuk pengobatan, suntikan juga digunakan dalam program imunisasi bayi dan anak yang mencapai 4,9 juta anak setiap tahunnya dan setiap anak memerlukan 8 suntikan. Oleh karena itu, jumlah limbah medis akut dan tajam di Indonesia sangat tinggi.

Puskesmas merupakan tempat berlangsungnya kegiatan yang dapat menimbulkan dampak positif dan negatif, dimana Puskesmas merupakan sumber daya untuk meningkatkan kesehatan dan juga dapat digunakan

sebagai sarana pendidikan bagi tenaga kesehatan dan penelitian. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas meliputi kegiatan penyembuhan bagi yang sakit dan pemulihan dari luka fisik dan mental. Dalam pengoperasian Puskes, tentunya dihasilkan berbagai macam limbah baik berupa benda cair, padat maupun gas. Selain fakta bahwa proses operasional dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya, pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan harus menggunakan teknologi yang dikatakan memiliki potensi pengembangan yang besar terhadap lingkungan⁴.

Kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia. Padahal menurut perkembangan hukum HAM internasional, pemenuhan hak-hak yang berhubungan dengan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah masing-masing negara. 7 Oleh karena itu, pemerintah setiap negara wajib memberikan hak kesehatan kepada warga negaranya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14-20 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 (UU No. 36 Tahun 2009). Karena kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dan karenanya menjadi prioritas pembangunan nasional negara. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa kesehatan meliputi segala aspek kehidupan yang ruang lingkup dan luasnya sangat luas, serta merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan sosial juga mencakup pemenuhan

⁴ Rachmat Witoelar, 29 Mei 2009, *Pidato Peluncuran Sistem Elektronik Pengelolaan Limbah B3*, Jakarta.

kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Seseorang melakukan berbagai upaya dalam hidupnya untuk mewujudkan kehidupan yang sehat, karena kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia, sedangkan upaya mewujudkan kehidupan yang baik dan sehat merupakan salah satu tugas pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, provinsi maupun kabupaten/kota.

Kementerian Kesehatan yang memiliki kewenangan teknis untuk menetapkan standar pelayanan kesehatan juga menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK-Setjen/2015 No. 10 tentang Persyaratan Teknis Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pada Pelayanan Kesehatan. Seperti limbah lainnya, limbah farmasi terkait dengan masalah lingkungan. Karena itu dalam penanganan limbah medis ini dilakukan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang memiliki otoritas dalam penerbitan produk hukum di bidang lingkungan hidup. Koordinasi juga dilakukan dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) yang memiliki otoritas dalam pengembangan teknologi tepat guna dalam pembuangan limbah medis⁵.

Didalam hukum lingkungan dikenal dengan prinsip kehati-hatian atau pencegahan dini, dimana jika berhasil dibuktikan secara ilmiah dan pasti mengenai pencemaran yang terdampak maka sudah cukup untuk mensegerakan upaya-upaya mencegah kerusakan lingkungan. Mengenai

⁵ Anonim, 2003, Penangan Limbah Medis Tajam Harus Segera Dibenahi, <http://www.depkes.go.id/development/site/jkn/index.php?view=print&cid=523&id=penanganlimbah-medis-tajam-harus-segera-dibenahi>, diakses pada tanggal 20/01/2019, jam 20.35

tentang prinsip kehati-hatian telah diatur dalam Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009. Prinsip kehati-hatian sendiri dirumuskan dalam Prinsip ke-15 Deklarasi Rio yang berbunyi “ *In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.*”(Rahmadi, 2016). Tujuan dari penerapan Prinsip kehati-hatian atau pencegahan dini adalah guna tindakan pencegahan dan antisipasi atas suatu dampak atau resiko yang dimungkinkan berasal dari suatu kegiatan tertentu sebagai akibat kegiatan manusia⁶. Dalam hal pembuangan limbah di tempat, masih ada beberapa limbah medis yang dibuang sembarangan dan tidak sesuai dengan praktik kesehatan yang ditetapkan. Kategori pembuangan akhir limbah B3 diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, Pemerintah melalui kementerian yang berwenang dengan nomor SE Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan sebagai berikut: SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020. Peraturan tersebut mengatur tentang pemanfaatan limbah infeksius dan limbah rumah tangga sebagai hasil pengobatan penyakit coronavirus (Covid-19). Dirjen Kesehatan Masyarakat melalui Direktur Penyehatan Lingkungan memberikan arahan pengelolaan sampah kepada rumah sakit rujukan,

⁶ Angga, L. O. (2014). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bidang Pertanian Untuk Keunggulan Varietas Produk Rekayasa Genetik*. SUPREMASI HUKUM, Vol 3(Vol. 3).

rumah sakit darurat dan puskesmas setempat yang merawat pasien COVID-19. Mereka terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama tentang pengelolaan air limbah, bagian kedua tentang pembuangan limbah padat rumah tangga dan bagian ketiga tentang pengelolaan limbah medis padat B3.

Untuk mengelola konsekuensi pengangkutan limbah B-3, diperlukan peraturan hukum yang jelas untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk memahami keputusan mengatasi masalah lingkungan, negara berkomitmen pada instrumen hukum lingkungan internasional di tingkat global dan regional. Kemudian negara juga mengikuti hukum nasional untuk melindungi lingkungan mereka. Pada tahun 1987, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menerbitkan Pedoman Kairo, yang merupakan perjanjian tidak mengikat tentang pembuangan limbah B-3. Kemudian UNEP juga memulai negosiasi internasional untuk menyusun perjanjian internasional yang mengikat. Setelah dua tahun negosiasi, pada tanggal 30 Mei 1989, perwakilan dari 103 negara menyepakati Konvensi Basel tahun 1989 untuk Pengendalian Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya (selanjutnya disebut "Konvensi Bale"), sebuah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk memecahkan masalah lingkungan yang timbul dari perdagangan limbah antara negara-negara B-3. Indonesia meratifikasi Konvensi Basel melalui Keputusan Presiden No.

61 Tahun 1993. Konvensi Basel merupakan instrumen hukum internasional yang secara luas dan global⁷

Konvensi Basel dirumuskan atas dasar meningkatnya kepedulian masyarakat dunia akan bahaya bahan dan bahan berbahaya lainnya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Masyarakat internasional juga sangat prihatin dengan tindakan negara-negara industri maju yang secara legal atau ilegal mengekspor limbah industrinya ke negara-negara berkembang untuk mencapai penghematan ekonomi. Isu yang sama pentingnya dalam perumusan Konvensi Basel adalah kekuatan masyarakat internasional dalam kaitannya dengan tanggung jawab internasional negara untuk perlindungan kesehatan manusia dan perlindungan lingkungan, untuk diamati sebagai hukum internasional sesuai dengan semangat, prinsip, tujuan dan fungsi dari Piagam Konservasi Alam yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam sesi ke-30. Karena permasalahan di atas, kesadaran masyarakat internasional telah menambah khazanah hukum internasional, menjadikan masalah lingkungan hidup sebagai masalah internasional yang juga harus diselesaikan secara internasional.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan revisi ke arah penyempurnaan dari dua undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang No.23 Tahun 1997 dan Undang-undang No.4 Tahun 1982. Dengan berlakunya Undang-undang No.32 tahun 2009 diharapkan kegiatan ekspor impor limbah B-3

⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun*, Airlangga University press, Surabaya, 2003, hal.3

dapat dikurangi karena pengaturan mengenai limbah B-3 telah mendapat tempat tersendiri dalam undang-undang ini. Pengaturan tentang limbah B-3 dan bahan berbahaya dan beracun diatur dalam bab khusus yaitu pada bab VII tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pada bagian kesatu Pasal 58 diatur khusus tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun yang memberikan kewajiban kepada setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum ini dilandasi oleh azas hukum lingkungan dan penataan setiap orang akan norma hukum lingkungan hidup yang sepenuhnya berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Hukum Internasional terhadap pengaturan pengelolaan Limbah sampah medis menurut Hukum internasional dan regional ?

2. Apa kebijaksanaan yang ditempuh Pemerintah RI untuk mencegah penumpukan limbah medis terkait pada penanganan covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah medis secara internasional maupun regional
2. Untuk mengetahui tentang kebijakan Pemerintah RI untuk pencegahan penumpukan limbah medis?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis bahwa hasil penelitian penulis dapat dijadikan sebagai penambah referensi ilmu bagi Kejurusan Ilmu Hukum terkait Pengaturan dan limbah medis berupa masker berdasarkan Hukum Internasional dan penerapannya di Indonesia..
- b. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran maupun bahan masukan juga pertimbangan bagi Pemerintah maupun stakeholder untuk kebijakan yang relevan untuk penanggulangan limbah medis yang demikian dikemudian hari.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan dapat memberikan kejelasan dalam pembahasan apa saja didalam penulisan skripsi ini, Maka penulis memberikan defenisi judul dari judul skripsi sebagai berikut :

1. Sampah atau Limbah Medis

Limbah medis adalah sisa-sisa produk baik itu biologis maupun non biologis yang dihasilkan oleh rumah sakit, klinik, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya termasuk laboratorium kesehatan. Limbah medis bisa berupa darah, cairan tubuh, tubuh, maupun alat-alat yang sudah terkontaminasi seperti jarum suntik, kain kasa, selang infus, dan lain-lain.

2. Hukum Internasional

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga :

- 1) Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain , dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu dan
- 2) Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat Internasional⁸. Sementara itu The American Law Institute mendefinisikan Hukum

⁸ Melda kamil ariadno, 2007, *Hukum Internasional Hukum yang hidup*, Diadit media, Jakarta, Hal. 176.

Internasional sebagai berikut : "The conduct of state and of international organisations, and with their relations inter se, as well as some of their relations with persons whether natural or personal"-tindakan-tindakan negara dan tindakan organisasi internasional, serta hubungan-hubungan mereka dengan orang-rang maupun badan hukum"⁹.

F. Landasan Teoritis

Dalam Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 1204/MENKES/SK/2004 Tentang Persyaratan Lingkungan Rumah sakit sudah mencakup bagaimana pengelolaan limbah rumah sakit. Masing-masing jenis limbah dari awal dipilah, sampai kepada pengelolannya sangat jelas dan sesuai dengan standar kesehatan. Dalam keputusan Menteri kesehatan tersebut, menyatakan bahwa rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan¹⁰.

Sedangkan beberapa peraturan atau kesepakatan internasional yang terkait dengan pengelolaan limbah sebagai berikut (WHO 2005) :

1. The basel convention, konvensi ini membahas tentang pergerakan limbah berbahaya lintas negara. Hanya limbah berbahaya resmi yang dapat

⁹ Starke, J.G, 2001, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh* , Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 16-17

¹⁰ Keputusan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah sakit.

di ekspor dari negara yang tidak memiliki fasilitas atau keahlian untuk memusnahkan limbah tertentu secara aman ke negara lain.

2. The “Polluter Pays” Principle, merupakan prinsip pencemar yang membayar, dimana semua penghasil limbah secara hukum dan finansial bertanggung jawab untuk menggunakan metode yang aman dan ramah lingkungan di dalam pembuangan limbah yang mereka hasilkan.

3. The ‘precautionary” Principle, merupakan sebuah pencegahan, dimana prinsip kunci yang mengatur masalah perlindungan kesehatan dan keselamatan.

4. The “duty of care” principle, merupakan prinsip yang menetapkan bahwa siapa saja yang menangani atau mengelola zat berbahaya atau peralatan yang terkait dengannya, secara etik bertanggung jawab untuk menerapkan kewaspadaan tinggi didalam menjalankan tugasnya.

5. The “proximity” principle, sebuah prinsip kedekatan, dimana penanganan pembuangan limbah berbahaya sebaiknya dilakukan dilokasi yang sedekat mungkin dengan sumbernya untuk meminimalkan membuang limbah yang dihasilkan didalam area lahan milik mereka.

Limbah medis merupakan salah satu limbah yang tergolong limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) maka dalam melakukan pengolahannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan pihak yang melakukan pengelolaan limbah medis harus memiliki izin dan telah tersertifikasi. Perizinan yang dimaksud adalah perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup.

Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pada pasal 22 tentang penanganan sampah terdapat beberapa point yang antara lain:

- 1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- 2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- 3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- 4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah;
- 5) Pemrosesan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah;
- 6) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Menurut Bernard Arief Sidharta, teori hukum adalah seperangkat pernyataan (klaim), pandangan dan pengertian yang saling berkaitan secara logika berkenaan dengan sistem hukum tertentu atau suatu bagian dari sistem tersebut, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berdasarkananya dimungkinkan untuk merancang hipotesis tentang isi aturan hukum (yakni produk interpretasi aturan

hukum) dan konsep yuridik yang terbuka untuk pengujian dan fungsi untuk mensistematisasi kaidah-kaidah hukum dengan cara tertentu. Lebih lanjut beliau katakan teori hukum dengan demikian berfungsi untuk menjelaskan, menilai dan memprediksi. Teori hukum dapat diuji secara empirikal dengan meneliti sejauh mana metode interpretasi dan intepretasi suatu aturan hukum digunakan dalam praktek hukum dan secara rasional dikaji konsistensinya dalam kerangka sistem hukum yang berlaku.¹¹

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum adalah landasan yang dikembangkan oleh beberapa ahli untuk menunjukkan tujuan terlaksananya hukum yang bersifat genera. sehingga adanya kepastian hukum ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, bukan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini didukung oleh beberapa pandangan yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak dapat berjalan secara bersamaan dengan keadilan dan kemanfaatan.

Teori ini yang di ada diartikan menurut salah satu pakar yaitu Gustav Radbruch yang berwarga negara Jerman, menjelaskan bahwa salah satu jaminan bagi warga untuk timbulnya sebuah keadilan dalam hal yang bersangkutan dengan hukum. membuat tidak adanya perbedaan didalam

¹¹ Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta, hal. 6

mata hukum sehingga membuat penegak hukum taat dengan aturan yang telah di buat.¹²

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebagai berikut:

“Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa aturan-aturan hukum yang telah dibentuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan hak asasi manusia (dalam hal ini setiap orang atau badan hukum yang menjadi subjek hukum dalam aturan hukum tersebut mendapat jaminan bahwa haknya akan terpenuhi serta kewajibannya akan dilaksanakan pula). Selain itu apabila terdapat permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan, maka Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim.”

Kepastian hukum memiliki kaitan yang sinkron dengan keadilan.

Akan tetapi meskipun berada dalam satu frekuensi yang sama, tidak dapat pula diartikan bahwa hukum identik dengan keadilan. Hal ini dikarenakan sifat dari hukum memiliki sifat yang umum sehingga mengikat bagi semua orang tanpa ada diskriminasi. Prinsip hukum yang umum dan tidak mendiskriminasi inilah yang diperlukan dalam menjamin kepastian hukum dalam hal investasi atau penanaman modal.¹³

Intisari kepastian hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan sebagai berikut:

“Adanya kepastian hukum merupakan sarana yang digunakan oleh para pencari keadilan dalam menghadapi tindakan-tindakan yang arogan dan sewenang-wenang oleh Pemerintah ataupun Penegak Hukum. Hal ini tidak terlepas dari ego sektoral yang menjadi kepentingan masing-masing aparat penegak hukum serta pemerintah. Kepastian hukum akan mengakomodir hak dan kewajiban yang seharusnya diterima dan dilaksanakan oleh warga negara sehingga memberikan batasan-batasan hal apa saja yang diperkenankan untuk dilaksanakan, hal apa saja yang tidak diperkenankan

¹² Moh. Mahfud MD, “*Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*”, (disampaikan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”, 8 Januari 2009)

¹³ *Ibid.*

untuk dilaksanakan, serta memberikan karakteristik perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini tentu akan berimplikasi pada penerapan hukum yang sesuai dengan tujuan, asas, prinsip serta norma yang digaungkan dalam aturan hukum tersebut.”

Kepastian hukum menandakan bahwa penerapan hukum positif telah dijalankan secara tepat. Selain itu subjek, objek, dan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan sudah sesuai. Beberapa ahli menyatakan bahwa kepastian hukum tidak mutlak ada setiap saat karena harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu permasalahan hukum yang timbul dengan mempertimbangkan asas-asas lain seperti kemanfaatan dan keadilan.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum normatif atau biasa disebut juga sebagai penelitian yuridis normatif¹⁴.

2. Pendekatan yang digunakan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah :

a. Perundang-Undangan (*Normative Approach*)

Bahder Johan Nasution menyatakan “Sebagian Ilmuan Hukum Pendekatan menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.12

penelitian terhadap produk-produk hukum”¹⁵. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian Hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

- b. Pendekatan Konseptual yaitu pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum yang relevan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian inimerupakan yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan. Untuk mengkaji masalah ini, bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu terdiri dari :

- 1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 2) The Basel Convention on The Control Of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal 1989

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju*, Bandung, 2008, hlm.92.

- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa pendapat hukum atau doktrin maupun teori yang diperoleh dari buku-buku, teks, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel dalam majalah dan surat kabar maupun website yang terkait dengan penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh.

Analisis dilakukan dengan cara :

1. Mengintepretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan dengan masalah yang diteliti
3. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

H. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 Bab secara sistematis bab demi bab dibahas guna mengetahui isi dari penulisan skripsi. Bagian dari setiap bab mempunyai sub-sub yang saling berkaitan serta bab demi bab mempunyai keterkaitan yang erat antar setiap babnya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang berupa pemaparan tentang segala hal yang diuraikan dalam penulisan yang berisikan latar belakang masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka kosneptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, merupakan bab yang menguraikan tentang penanggulangan sampah medis berdasarkan peraturan perundang undangan, pendapat ahli dan realita yang terjadi di masyarakat, Tinjauan umum tentang isu hukum dalam penulisan skripsi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bab ini merupakan kerangka teori yang nantinya akan menjadi landasan untuk bab yang akan dibahas selanjutnya.

Bab III Pembahasan, merupakan bab yang menguraikan perumusan masalah mengenai perlindungan dan upaya hukum bagaimana yang akan ditempuh ketika terjadinya kebijakan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta bagaimana langkah-langkah terbaik dalam pencapaian maksud dari penulis dalam skripsi ini.

Bab IV Penutup, merupakan bab yang memuat keseluruhan isi yang disimpulkan dari uraian yang tertuang dalam bab-bab yang sebelumnya mengulas tentang segala persoalan dan isi hukum dalam penelitian ini serta berisikan saran-saran yang membangun dan solusi yang timbul dalam penulisan skripsi ini.